

**PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DAERAH
(Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI



Nama : Diyan Utari

Nim : 222018055

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2022

**PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DAERAH**
(Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Diyan Utari

Nim : 222018055

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diyan Utari

NIM : 222018055

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, 2022



Diyan Utari

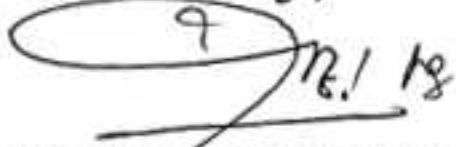
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap
Penerimaan Pajak Daerah
Nama : Diyan Utari
NIM : 222018055
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

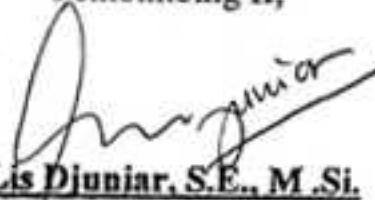
Diterima Dan Disahkan
Pada Tanggal,

Pembimbing I,



M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si.
NIDN/NBM : 0204076802/1191648

Pembimbing II,



Lis Djuniar, S.E., M.Si.
NIDN/NBM : 0220067101/1115716

Mengetahui,

Dekan

U. K. Kerja Program Studi Akuntansi

Dr. Betri, S.E., M.Si., AK.CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Persembahan :

- Allah SWT, terimakasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu laporan ini dapat terlaksana dengan baik
- Terima kasih Kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan sejauh ini dan sekuat ini untuk melewati semua nya.
- Ayahanda tercinta, Ayah aku terlahir dengan harapan, mencoba berjalan dan berlari meraih cita dengan mengukir tinta emas mencapai sebuah perjuangan dan menuju mimpi tanpa batas dengan segala semangat dan doa aku ingin membuat ayah menangis Bahagia karena aku bisa menjadi apa yang ayah pinta, terima kasih ayah
- Ibunda tercinta pesan yang selalu ku ingat dari ibu adalah “Ketidaktelesmpurnaan inilah yang merupakan sulaman benang rapuh untuk menjadikan kota lebih baik selalu berusaha dan berdoa Terimakasih ibu”.
- Adikku tercinta terimakasih atas semangat yang diberikan selama ini dan doa yang selalu dipanjatkan.

Motto:

- Hii isilah hidup dengan sabar dan sholat
- Tidak ada kata menyerah untuk meraih impian
- Tiada kesuksesan yang dapat diraih tanpa adanya usaha, kerja keras dan doa
- Hidup adalah pilihan dan perjuangana, dan pilihan pilihan itu ada di tangan kita
- Janganlah selalu memikirkan hasil yang besar, mulailah berusaha walupun hasilnya kecil dan Walupun sedikit asal nyata hasilnya
- Jangan mudah menyerah menghadapi masalah, karena masalah datang untuk di selesaikan bukan untuk dihindari.

PRAKATA



Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang maha pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah”**. Allahumma Shalli ‘Ala Muhammad, penulis curahkan kehadiran junjungan umat, pemberi syafaat, penuntun jalan kebajikan, penerang dimuka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasulullah SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Aamiin.

Penulis merasa sangat berhutang budi pada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara materiil maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ayahanda (**Sutatak**) dan Ibunda (**Sunarti**) tercinta yang merupakan motivator dalam hidupku dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang hingga penulis dapat menyelesaikan studi. Kepada yang

terhormat Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., M.S., S.H., M.Si., selaku Pembimbing I dan Ibu Lis Djuniar, S.E., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu sampai selesai Skripsi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya, penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
2. Bapak Yudha Mahrom, DS, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Dr. Betri, S.E, Ak., M.Si., C.A., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.
4. Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mengajarkan ilmu dan memberikan nasihat-nasihat yang membuat penulis termotivasi untuk semangat belajar serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang membantu kelancaran dalam mengurus administrasi.
6. Pimpinan dan seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu memberikan saran pada penulis.
7. Almamaterku yang tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik

yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon ridho dan magfirah-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT. Semoga karya ini dapat bermanfaat kepada para pembaca, Aamiin.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A...Latar Belakang.....	1
B...Rumusan Masalah.....	10
C... Tujuan Penelitian.....	10
D...Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A...Landasan Teori.....	12
1....Teori Umum.....	12
2....Pajak Daerah.....	13
3....Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
4....Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	21
B. Penelitian Sebelumnya.....	25
C. Kerangka Pemikiran.....	32
D. Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A...Jenis Penelitian.....	33
B...Lokasi Penelitian.....	34
C...Operasional Variabel.....	35
D...Populasi dan Sample.....	35
E... Data yang Diperlukan.....	37
F... Metode Pengumpulan Data.....	38
G...Analisis Data dan Teknik Analisis.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	

A...Hasil Penelitian	45
B...Pembahasan Hasil Penelitian	66

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A...Simpulan.....	71
B...Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA.....73

LAMPIRAN- LAMPIRAN..... 75

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Penerimaan PKB dan BBN-KB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019-2021	7
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	28
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	35
Tabel IV.1 Penerimaan PKB, BBN-KB, Pajak Daerah.....	55
Tabel IV.2 Hasil Statistik Deskriptif	56
Tabel IV.3 Hasil Uji Multikolinearitas	59
Tabel IV.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	61
Tabel IV.5 Hasil Regresi Linier Berganda	62
Tabel IV.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	63
Tabel IV.7 Hasil Uji t	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar VI.1 Hasil Output Uji Normalitas	58
Gambar VI.2 Hasil Output Uji Heterokedastisitas.....	60

ABSTRAK

Diyan Utari/222018055/2022/Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah/Akuntansi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan?, 2) Apakah pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan? Tujuannya untuk mengetahui: 1) Mengetahui Berapa Besar Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2) Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, dan dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) Secara bersama-sama (simultan), adanya pengaruh positif dan signifikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2) Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial menyatakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Kata kunci: pendapatan daerah, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor.

ABSTRACT

Diyani Utari/222018055/2022/*The Effect of Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fees on Regional Tax Revenue/Accounting.*

The formulation of the problem in this study are: 1) Does the motor vehicle tax (PKB) affect local tax revenues in South Sumatra Province?, 2) Does the transfer of motor vehicle title tax (BBNKB) affect local tax revenues in South Sumatra Province? The aim is to find out: 1) Knowing how much influence the Motor Vehicle Tax (PKB) has on the Regional Tax Revenue of South Sumatra Province, 2) Knowing how big the Effect of Transfer of Motorized Vehicle Title Fee (BBNKB) on Regional Tax Revenue of South Sumatra Province. This research includes associative research. The method of data collection in this research is the technique of documentation, and documents. The results of the analysis show that: 1) Simultaneously, there is a positive and significant effect of Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fees on Regional Revenue of South Sumatra Province, 2) The results of hypothesis testing which are carried out partially state Motor Vehicle Tax and The Transfer Fee for Motorized Vehicles has a positive and significant impact on Regional Tax Revenue.

Keywords: *regional income, motor vehicle tax, transfer fees for motorized vehicles*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk Provinsi dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Pajak Provinsi yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Dari jenis-jenis Pajak Daerah penerimaan yang memberikan pendapatan atau kontribusi cukup besar dalam Peningkatan Pendapatan Daerah yang berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor inilah yang membuat masyarakat berlomba-lomba untuk membeli kendaraan bermotor untuk menunjukkan drajat perekonomian mereka. Hal inilah yang membuat konsumsi kendaraan yang tinggi dan akan didukung pula dengan kebutuhan jumlah bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut dapat berpengaruh pada daerah, yaitu akan mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh Wajib Pajak membayarnya dengan tidak mendapat prestasi Kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. (Marihhot 2013:7)

Penerimaan yang dipungut, dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah maupun retribusi daerah (Siti Rahayu 2017:49). Penerimaan Pajak adalah sebagai tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan dan penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Marihhot 2013:175). Secara umum pajak tersebut diperuntukan bagi perseorangan atau perusahaan maupun bentuk badan tertentu yang secara sah memiliki dan memanfaatkan atas kendaraan bermotor.

Bea balik nama kendaraan adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah waris atau pemasukan kedalam badan usaha (Dwi & Angga,2020). Pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu tindakan pemerintah guna menertibkan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Saat ini di Indonesia, penarikan pajak dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, agar tidak membingungkan dan merugikan masyarakat. Secara umum sendiri pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk pemerintahan dan pembangunan (Marihhot 2013:7).

Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat persentasi Kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum disatu pihak untuk merealisasikan Sebagian tujuan ekonomi,sosial politik, dan tujuan-tujuan lain yang ini dicapai oleh negara (Gusfahmi 2010:31)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PDRD pasal 21 nomor 32 tahun 2004, pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pasti ada diseluruh provinsi hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak menegakan suatu jenis pajak provinsi. Maka untuk dapat dipungut pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan tentang peraturan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan menjadi landasan hukum operasional dalam pengenaan dan pemungutan BBNKB di daerah provinsi yang bersangkutan.(Marihhot 2013:211)

Ada beberapa Fenomena yang terjadi pada Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor , Adapun Fenomena yang terjadi pada Pajak Kendaraan Bermotor yaitu 188 Ribu kendaraan disubang Menunggak Pajak. Kepala P3DW / Samasat Kabupaten Subang Lovita Adriana Rosa Mengatakan “Total Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kabupaten Subang mencapai 434.000 Objek Pajak, 90% kendaraan tersebut adalah Sepeda motor dan dari 434.000 hanya 118.000 Kendaraan belum bayar Pajak Tahunan dan tidak mendaftarkan ulang” (TribunJabar : 2022).

Usut Penggelapan Setoran BBNKB, kehati Banten sita Uang Rp.5,9 Milyar. Kasi Penerangan kehati Banten Ivan Hebron Siahaan mengungkapkan “Sudah dilakukan tindakan Penyitaan uang yang merupakan bagian dari penggeledahan, total Rp.5,9 Milyar dilakukan dari Bapenda dan ada yang sudah disetorkan ke rekening kas. Penggelapan Pajak dilakukan dengan cara

mengubah pembayaran BBNKB penyerahan pertama menjadi BBNKB penyerahan kedua. (News, DDTC : 2022).

Penerimaan Pajak daerah yang bersumber dari PKB dan BBN-KB tidak hanya diperuntukan untuk kabupaten/ kota, tetapi terdapat bagi hasil antara kabupaten/kota dengan provinsi. Sebagaimana dinyatakan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh Kepada Kabupaten/Kota, Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dapat ditetapkan sebagai berikut (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan rincian 50 % (lima puluh persen) dibagi dengan porsi yang sama besar untuk keseluruhan kabupaten/kota; dan 50% (lima puluh persen) dibagi dengan pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi pajak. (Nurul Aliyah dkk , 2019)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2010 Tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pada pasal 2 point 1 pajak terdiri atas; (a) Pajak Provinsi dan (b) Pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak yang masuk ke dalam Pajak Provinsi adalah: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air dan Permukaan, Pajak Rokok. Pajak Daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar Penerimaan Pajak suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin

rendah penerimaan Pajak suatu Daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Dari komposisi pajak daerah, sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan penyumbang terbesar dari pajak daerah yang pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Evi,2021)

Penelitian Sebelumnya yang dilakukan oleh Dedi dkk (2019) dengan Judul Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta. Dimana Variabel Pajak Kendaraan Bermotor Terdapat Hubungan Yang sangat Kuat Dan Signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pajak Daerah Sebesar 0.933 atau 93,3% pada tahun 2019.

Penelitian Sebelumnya dilakukan oleh Fitri dkk (2019) yang berjudul Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor . Hasil Uji Koefisien Korelasi disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Sebesar 0,378 Pada Tahun 2020.

Kesan positif terhadap peranan pajak di Indonesia, tentu saja akan mampu meningkatkan kesadaran dan kemampuan wajib pajak untuk

menyelesaikan kewajibannya, termasuk dalam membayar pajak. Dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini diharapkan bisa berdampak positif untuk wajib pajak sadar akan pentingnya melakukan pembayaran pajak. Contohnya seperti kewajiban membayar pajak, masyarakat akan paham bahwa membayar pajak berarti masyarakat berperan dalam melakukan gotong royong nasional dalam mengumpulkan dana untuk pemerintah bangsa Indonesia dan pembangunan di negara Indonesia (Mardiasmo,2016:25).

Adapun Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBN-KB) Pada Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2021 adalah sebagai Berikut:

Tabel I.1
Penerimaan PKB dan BBN-KB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Provinsi Sumatera Selatan (2019 -2021)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	PKB (Rp)	BBN-KB (Rp)	PAJAK DAERAH (RP)
1	Palembang	2019	441.654.682.625	358.102.453.425	803.213.455.772
		2020	240.811.913.285	207.057.577.200	449.481.651.045
		2021	149.739.125.025	106.944.661.850	257.955.750.658
2	Muba	2019	36.487.611.532	65.106.689.500	102.153.295.956
		2020	39.344.892.450	47.282.853.000	87.089.781.000
		2021	40.843.128.925	71.489.362.500	112.687.236.370
3	Banyuasin	2019	44.207.294.000	64.028.646.500	12.143.652.825
		2020	48.536.565.950	46.392.363.500	95.572.946.715
		2021	50.831.155.025	74.923.803.750	126.126.039.949
4	OKI	2019	27.893.989.350	37.978.139.500	69.186.148.615
		2020	30.729.102.950	27.131.900.000	61.690.262.652
		2021	33.603.561.400	56.709.243.350	93.591.339.534
5	Ogan Ilir	2019	23.325.720.850	26.892.669.00	50.449.150.611
		2020	22.580.106.350	19.806.663.000	42.536.394.195
		2021	22.222.370.413	27.983.928.500	50.258.159.528
6	OKU	2019	33.668.939.920	29.909.451.100	63.997.531.288
		2020	32.154.026.075	18.257.016.000	50.651.536.971
		2021	29.744.537.825	25.919.477.000	55.851.203.760

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	PKB (Rp)	BBN-KB (Rp)	PAJAK DAERAH (Rp)
7	OKU Selatan	2019	10.412.284.155	11.937.183.500	22.374.922.995
		2020	12.065.848.050	10.641.111.500	22.735.375.790
		2021	12.063.996.675	12.094.148.000	24.182.084.410
8	OKU Timur	2019	20.888.433.625	29.875.849.000	50.893.248.865
		2020	23.808.670.200	19.554.910.050	43.420.160.205
		2021	22.815.510.457	30.784.375.000	53.632.904.472
9	Muara Enim	2019	57.058.773.950	80.466.463.000	143.655.172.275
		2020	52.804.355.100	56.005.406.675	113.504.693.473
		2021	52.003.716.100	53.295.434.500	107.553.681.656
10	Prabumulih	2019	34.110.722.747	39.954.728.250	74.275.818.597
		2020	37.980.896.200	28.864.901.000	66.990.203.915
		2021	37.070.984.375	29.941.003.500	67.037.317.125
11	Lahat	2019	35.744.778.926	37.305.252.000	74.132.604.832
		2020	36.163.607.833	27.198.914.000	64.395.328.445
		2021	37.341.307.475	39.034.970.500	77.154.331.120
12	Pagar Alam	2019	8.419.812.892	5.920.007.250	14.346.844.142
		2020	9.146.553.175	4.929.797.000	14.081.328.779
		2021	9.146.433.075	6.292.494.000	15.443.904.875
13	Musi Rawas	2019	23.487.892.750	29.798.845.500	53.458.461.460
		2020	17.418.336.025	23.227.528.000	40.750.638.638.105
		2021	15.388.641.000	24.225.126.500	39.682.747.845
14	Lubuk Linggau	2019	30.469.726.175	26.998.275.500	5557.525.419.694
		2020	33.618.452.975	18.548.688.500	52.359.904.171
		2021	32.230.291.400	26.585.939.000	58.841.386.527
15	Empat Lawang	2019	5.125.144.075	5.955.188.750	11.083.262.966
		2020	5.685.627.670	4.219.549.500	9.911.745.690
		2021	5.620.572.475	4.565.683.000	10.189.186.225
16	Muratara	2019	4.220.014.625	-	4.408.519.010
		2020	5.605.572.400	992.437.500	6.692.189.780
		2021	5.620.572.475	10.883.008.000	18.283.903.179
17	Pali	2019	5.808.900.900	-	5.894.617.093
		2020	8.645.684.100	6.680.551.000	15.424.860.541
		2021	10.860.737.950	13.957.246.000	24.910.053.747

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada setiap kabupaten mengalami peningkatan dan beberapa daerah yang masih belum terealisasi dengan baik dan mengalami fluktuasi, belum lagi ada beberapa Kota dan Kabupaten yang jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotornya lebih kecil dari Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotornya, Contohnya seperti Kabupaten

Banyuasin pada tahun 2019 dimana jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Rp. 44.207.294.000 Sedangkan untuk Bea Balik Nama jumlahnya cukup besar yaitu Rp. 64.028.646.500 hal tersebut terjadi pula pada Kabupaten Muara Enim pada tahun 2019 dimana Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Rp.57.058.773.950 sedangkan untuk jumlah Penerimaan Bea Balik Nama Lebih Besar yaitu Rp.80.466.463.000. Jumlah kendaraan bermotor yang cukup besar jumlahnya di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan bisa berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBN-KB, tetapi kenyataannya hasil yang didapatkan belum optimal Karena masih banyak Kota/ Kabupaten yang jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotornya lebih kecil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Hal tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak mendaftarkan ulang kendaraanya, banyaknya Kendaraan Bermotor yang Belum Teregresi oleh Bapenda sebagai potensi Pajak serta masih banyak tembak menembak KTP Dalam proses perpanjangan STNK. Sehingga terjadinya ketidak seimbangan antara jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Penerimaan Pajak Daerah 2019-2021”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang diteliti meliputi :

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Berapa Besar Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2. Bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi bagi badan Pendapatan Daerah dan Bagi pemerintah sebagai acuan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahya Nurdin , (2022) “ 188 Ribu Kendaraan di Subang Menunggak Pajak, Samsat Gelar Pemutihan” *TribunJabar.id* <https://jabar.tribunnews.com/2022/06/28/118-ribu-kendaraan-di-subang-menunggak-pajak-samsat-gelar-pemutihan>
- Dwi , Anggraini ., Saputri , & Angga , Jaya ., Saputra . “*Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.*” *Jurnal Accounting Global* Vol 4 , No 1.
- Dedi Suharyadi , Rini Martiwi, Eulin Karlina. “*Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta*” P-ISSN 2355-2700 Vol.6 No.2 Oktober 2019.
- Diah Elvina, Desi Indriasari. “*Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan*” ISSN : 2579-969X.
- Evi Purnamawati .2021. “*Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah.*” *Perpajakan* Vol.19 No.5, 2597-680.
- Fitri Rahmayati, Eka Dyah Setyaningsih, Nurul Hidayah. “*Analisis Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta*”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol.7 No.1 April 2020.
- Fauzan Rahmad.2020”*Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah*” *Jurnal akuntansi Perpajakan* Vol.20 No.8, 3977-780.
- Mardiasmo . (2016). *Perpajakan Edisi Revisi . Andi Offset . Yogyakarta.*
- Marihot, P Siahaan . (2013). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.- Ed. Revisi.3.- Jakarta : Rajawali Pers , 2013.*
- Muhammad Wildan, (2022). “Usut Penggelapan Setoran BBNKB, Kejati Banten Sita Uang Rp5,9 Miliar” *DDTC News* <https://news.ddtc.co.id/usut-penggelapan-setoran-bbnkb-kejati-banten-sita-uang-rp59-miliar-39674>
- Nurul Aliyah , Abu Bakar, & Nasir. (2019). “*Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap PAD Aceh.*” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia* Vol.6 No.1 , 2549 – 8355.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Rahmad Mukhtadi “*Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah*” Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 22302-1072.

Sugiyono. (2017) . *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif , Dan R & D.-* Bandung : Alfabeta

Septiana Widiya Ningsih, Anim Rahmayati.(2019). “*Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah*”

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Undang- Undang Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah.

V. Wiratna Sujarweni. 2022. *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.